

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan badan usaha berbentuk Koperasi di Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota Koperasi dan untuk membangun masyarakat yang maju, adil dan makmur. Keberadaan usaha berbentuk Koperasi tersebut ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Pasal 33 ayat 1, bahwa bentuk badan usaha yang ideal dalam perekonomian masyarakat Indonesia adalah Koperasi. Berdasarkan landasan tersebut, lahir Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang *Perkoperasian*.

Selain Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Swasta, koperasi juga merupakan salah satu pelaku ekonomi di sektor formal dan berperan penting dalam mendorong pembangunan perekonomian nasional. Menurut Tjakrawerdaja *et al.* (2017) bidang usaha yang menguasai kehidupan banyak orang dan dapat dilaksanakan oleh banyak orang haruslah dilaksanakan oleh Koperasi. Selanjutnya, bidang bisnis strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak hanya dapat dilakukan oleh BUMN, karena melibatkan modal yang besar dan teknologi tinggi, tujuannya untuk menstabilkan dan mewujudkan pemerataan perekonomian nasional. Pada saat yang sama, swasta juga dapat berperan penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, serta dalam menciptakan efisiensi dan daya saing dalam perekonomian nasional.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Pasal 4 menjelaskan bahwa pembangunan sektor Koperasi sangat relevan dalam meningkatkan indikator perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Mubyarto, 2003). Pembangunan Koperasi menurut Swasono (2004) merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan Koperasi menjadi bagian dari perekonomian masyarakat serta mampu menjadi pilar penyangga (*sokoguru*) ekonomi nasional, sehingga memiliki peran yang besar dalam peningkatan kesejahteraan.

Sebagai organisasi sosial-ekonomi, koperasi memiliki aspek pemberdayaan diri (*self-empowering*), tujuannya bukan untuk mencari laba (*profit*), tetapi sebagai wadah (*fasilitator*) usaha milik bersama yang tujuan

utamanya adalah membawa manfaat (*benefit*) bagi anggotanya (Swasono, 2004; Mubyarto, 2010). Oleh karena itu, pengembangan atau pembangunan koperasi itu sendiri merupakan bentuk peningkatan produktivitas Koperasi dan kesejahteraan anggotanya melalui jumlah anggota, aset, omset, modal, dan Sisa Hasil Usaha (SHU), dengan tujuan untuk memelihara keberlanjutan bisnis di masa depan (*cooperative of sustainable future*). (Sitio & Tamba, 2001; Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 4 tahun 2012).

Pembangunan koperasi merupakan bagian penting dari perekonomian negara berkembang karena dapat menghasilkan pendapatan (output) yang realistis, membantu mengurangi ketimpangan pendapatan, angka kemiskinan, tingkat pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (DeVillie *et al.*, 2007). Agusalim *et al.* (2019), Alkire & Foster (2011) dan Dogarawa (2005) menyatakan, Koperasi memainkan peranan penting dalam penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Bharadwaj (2012) dimana Koperasi adalah lembaga sosial-ekonomi yang cukup efektif untuk mengatasi masalah kemiskinan terutama di wilayah pedesaan.

Smith & Rothbaum (2013) mengemukakan bahwa sektor Koperasi berperan besar dalam peningkatan produktivitas dan daya saing nasional melalui inovasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Kumar *et al.* (2018) di India, Ma & Abdulai (2016) di Tiongkok, dan Verhofstadt & Maertens (2014) di Rwanda, ditemukan bahwa Koperasi berperan penting dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan, kondisi perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah kinerja perekonomian sebagai capaian dari kinerja indikator-indikator perekonomian dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah secara agregat dalam jangka waktu tertentu dalam mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi. Kinerja perekonomian sangat efektif digunakan baik secara lokal, regional, nasional, dan multinasional terkait indikator perekonomian secara makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, defisit anggaran, pengangguran, kemiskinan, dan lainnya (Arsyad, 2006; Mankiw, 2012). Sementara itu, kesejahteraan sosial-ekonomi (*welfare economic*)

merupakan output dari struktur pasar dan distribusi komoditas dan sumber daya dalam kegiatan ekonomi untuk menentukan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Atkinson, 2012; Dogarawa, 2005; Dunggio, 2019).

Kesejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui pemerataan pertumbuhan dan pembangunan yang adil di semua sektor kehidupan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum mencerminkan kesejahteraan masyarakat, namun kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran masih menjadi masalah besar (Kamarni *et al.*, 2019; Midgley, 2014). Selain itu, jika tidak dilakukan upaya pemerataan distribusi pendapatan dan pengembangan bisnis koperasi sebagai salah satu institusi yang juga berperan secara agregat dalam perekonomian, maka kenaikan pertumbuhan ekonomi dapat berisiko memperlebar ketimpangan pendapatan yang pada gilirannya dapat mengancam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (World Bank, 2013).

Penggambaran capaian dari setiap indikator perkembangan Koperasi di Indonesia saat ini secara umum merupakan potret akumulasi secara mikro dari setiap daerah, termasuk Kota Padang yang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Barat dengan visi misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 tentang peningkatan kinerja Koperasi dan UMKM dalam perekonomian Kota Padang (BPS Kota Padang, 2019). Rangkuman capaian dari setiap indikator perkembangan Koperasi di Kota Padang selama 3 tahun terakhir (2017-2019) ditampilkan pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1. Data Perkembangan Koperasi di Kota Padang Selama Periode 2017 s/d 2019

| Indikator | 2017 | 2018 | 2019 | growth (%) |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Volume Usaha Koperasi (Rp. 000) | 1.860.693.205 | 2.107.125.586 | 2.284.235.151 | 22,76 |
| Aset Usaha Koperasi (Rp. 000) | 1.120.671.879 | 1.273.093.229 | 1.387.553.868 | 23,81 |
| Modal Usaha Koperasi (Rp. 000) | 730.842.034 | 825.142.228 | 897.397.224 | 22,79 |
| Jumlah Anggota Koperasi (Orang) | 193.600 | 206.087 | 210.291 | 8,62 |
| Sisa Hasil Usaha Koperasi (Rp. 000) | 101.224.583 | 114.674.675 | 125.996.935 | 24,47 |
| Jumlah Koperasi (Unit) : | 712 | 717 | 722 | 1,40 |
| a) Koperasi Aktif | 678 | 528 | 410 | |
| b) Koperasi Tidak Aktif | 34 | 189 | 312 | |

Sumber : Diskop-UMKM Kota Padang, 2020

Perkembangan masing-masing indikator pembangunan Koperasi di Kota Padang selama periode 2017-2019 seperti disajikan dalam Tabel 1. di atas menunjukkan angka peningkatan yang cukup signifikan. Jumlah Koperasi di Kota Padang pada tahun 2019 telah mencapai 722 unit (410 aktif dan 312 tidak aktif) atau bertumbuh sekitar 1,40% per tahun selama 3 tahun terakhir. Dengan peningkatan jumlah anggota Koperasi sebanyak 8,26% per tahun (201.291 orang pada tahun 2019), telah menjadikan masing-masing indikator pembangunan sektor Koperasi lainnya juga ikut mengalami peningkatan rata-rata 23,46% per tahun terhadap volume usaha, aset usaha, modal sendiri, dan SHU. Hal ini tentunya menjadi indikasi bahwa peningkatan masing-masing indikator tersebut seharusnya mampu berkontribusi lebih besar terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kota Padang selama 3 tahun terakhir.

Deskripsi indikator perkembangan Koperasi di atas, tentunya menyiratkan berbagai pertanyaan yang memerlukan analisis dan kajian lebih lanjut terhadap peningkatan kinerja perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kota Padang itu sendiri. Secara teoritis dan berbagai kajian empiris di berbagai negara dan wilayah di Indonesia telah dibuktikan, namun kondisi tersebut tentu mengalami perbedaan di Kota Padang. Sehingga, penelitian ini ingin membuktikan hasil empiris tersebut secara langsung baik DeVille *et al.* (2007); Dogarawa (2005); Alkire & Foster (2011); Atkinson (2012); Agusalim, *et al.* (2019) dan Dunggio (2019) memiliki relevansi bahwa perkembangan Koperasi tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan kinerja perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Atau bahkan ditemukan pembuktian terbalik dari hipotesis Hatta (1987) yang menyatakan bahwa perlunya membangun sistem badan usaha Koperasi, sebelum mampu membangun perekonomian untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentunya memerlukan pembuktian secara empiris khususnya dalam perkembangan Koperasi di Kota Padang di masa datang. Maka, judul penelitian ini adalah : ***Analisis Perkembangan Koperasi Terhadap Perekonomian Kota Padang.***

B. Masalah Penelitian

Kota Padang merupakan salah satu wilayah yang memiliki populasi Koperasi terbanyak di Provinsi Sumatera (410 dari 1.919 unit) atau sebesar 21,70% pada tahun 2019 (BPS Kota Padang, 2020). Pembangunan sektor-sektor ekonomi potensial, salah satunya sektor ekonomi (Koperasi) diharapkan mampu dijadikan sebagai landasan untuk melaksanakan pembangunan di bidang lainnya. agar pendapatan daerah dapat ditingkatkan (Sjafrizal, 2012). Namun, jika dilihat dari struktur perekonomian Kota Padang pada tahun 2019 dengan nilai total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp. 46.467.410,23 juta masih didominasi oleh sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 17,17% (Rp. 7.950.756,70 juta), sektor Perdagangan dan Reparasi sebesar 16,94% (Rp. 7.584.788,52 juta), sektor Industri Pengolahan sebesar 12,29% (Rp. 5.709.553,72 juta) dan sektor Konstruksi sebesar 9,69% (Rp. 4.501.795,42 juta). Sementara itu, sektor Keuangan dan Asuransi yang didalamnya terhadap sub sektor Koperasi mampu memberikan kontribusi terhadap total PDRB sebesar 4,31% (Rp. 2.001.523,78 juta) (BPS Kota Padang, 2020).

Begitu juga indikator kinerja perekonomian Kota Padang tahun 2019, seperti pertumbuhan ekonomi dengan angka 5,68%, *Gini ratio* sebesar 0,31, TPAK sebesar 61,45%, dan jumlah penduduk miskin sebanyak 42,44 ribu jiwa (4,48%). Sedangkan indikator kesejahteraan masyarakat menunjukkan bahwa pada tahun 2019 *life expectation index* sekitar 73,51 tahun, *expected years of schooling* sekitar 16,51 tahun, *mean years of schooling* sekitar 11,34 tahun, dan *expenditure per capita* di Kota Padang mulai tahun 2010 s/d 2019 adalah sebesar Rp. 1.227.333 per bulan (BPS Kota Padang, 2020). Sehingga, masing-masing indikator perkembangan Koperasi dalam kinerja perekonomian Kota Padang semestinya mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat baik secara langsung maupun berkontribusi sebaliknya.

Adapun yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah berkaitan dengan kajian teoritis dan empiris sebelumnya dengan mengambil periode yang lebih representatif dalam perkembangan Koperasi terhadap perekonomian Kota Padang dari tahun 2012 s/d 2019 , yaitu :

- 1) Bagaimana dampak perkembangan Koperasi terhadap kinerja perekonomian di Kota Padang selama periode 2012 s/d 2019?
- 2) Bagaimana pengaruh perkembangan Koperasi terhadap kesejahteraan masyarakat yang dimediasi oleh kinerja perekonomian di Kota Padang selama periode 2012 s/d 2019?
- 3) Bagaimana implikasi kebijakan Koperasi dalam upaya meningkatkan kinerja perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Merujuk rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis pengaruh perkembangan Koperasi terhadap kinerja perekonomian di Kota Padang selama periode 2012 s/d 2019.
- 2) Untuk menganalisis pengaruh perkembangan Koperasi terhadap kesejahteraan masyarakat yang dimediasi oleh kinerja perekonomian di Kota Padang selama periode 2012 s/d 2019.
- 3) Untuk menentukan implikasi kebijakan pembangunan Koperasi dalam meningkatkan kinerja perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kota Padang.

Lebih lanjut, manfaat yang dapat diharapkan dan direkomendasikan dari hasil penelitian empiris ini adalah :

- 1) Bagi Pelaku Usaha Sektor Koperasi di Kota Padang
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi dan bahan evaluasi dalam pengembangan ekonomi pelaku atau badan usaha sektor Koperasi dalam meningkatkan kinerja perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara umum dan kesejahteraan anggota khususnya di Kota Padang berdasarkan indikator volume usaha, aset usaha, modal Sendiri, jumlah anggota, dan SHU.
- 2) Bagi Pemerintah Kota Padang dan Perguruan Tinggi
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi dan bahan evaluasi dalam perumusan dan implementasi kebijakan sesuai dengan regulasi yang tertuju secara langsung terhadap pembangunan Koperasi dalam meningkatkan kinerja perekonomian melalui indikator angka

pertumbuhan ekonomi, indeks ketimpangan pendapatan, angka pengangguran, dan tingkat kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia.

- 3) Dapat menjadi bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, yang berkaitan dengan pembangunan Koperasi dalam meningkatkan kinerja perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kota Padang.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Batasan dan lingkup kajian dalam penelitian ini, yaitu :

- 1) Objek kajian penelitian ini adalah seluruh Koperasi aktif berdasarkan data keragaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dengan periode pengamatan perkembangan Koperasi yang paling representatif dari tahun 2012 s/d 2019 yang ditentukan berdasarkan UU No. 25 tahun 1992 tentang *Perkoperasian* dan Permenkop-UKM No. 10 Tahun 2015 tentang *Kelembagaan Koperasi*.
- 2) Variabel terkait yang digunakan dalam kajian ini adalah fokus pada perkembangan Koperasi dengan indikator volume usaha, aset, modal sendiri, jumlah anggota dan SHU. Variabel kinerja perekonomian meliputi indikator pertumbuhan ekonomi, *Gini ratio*, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan. Sedangkan variabel kesejahteraan masyarakat secara umum meliputi indikator IPM.

E. Sistematika Penulisan

Susunan sistematika penulisan dan gambaran menyeluruh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan Pendahuluan, menjelaskan latar belakang dilakukannya penelitian, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup serta sistematika penulisan penelitian ini. Bab kedua adalah Tinjauan Kepustakaan, membahas terkait tinjauan teori dan konsep penelitian dari berbagai sumber literatur dari jurnal, buku, dan sumber ilmiah lainnya. Selanjutnya menyajikan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis yang relevan terkait dengan penelitian ini. Berikutnya bab ketiga, mengkaji

Metode Penelitian, memuat tentang jenis, populasi dan sampel penelitian, data dan sumber data, serta metode analisis.

Bab keempat menjelaskan Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab keempat ini mendeskripsikan dan memaparkan hasil penelitian dan diskusi tentang hasil temuan empiris penelitian, serta beberapa implikasi kebijakan berdasarkan hasil penelitian, terkait dengan perkembangan Koperasi, kinerja perekonomian, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Padang. Bab kelima adalah bab penutup dari penelitian ini, menyajikan beberapa poin Kesimpulan dan Saran yang dapat ditarik dari analisis dan pembahasan hasil temuan penelitian serta rekomendasi atau saran dan keterbatasan penelitian yang dapat menjadi referensi bagi pemerintah sebagai bahan referensi untuk pengambilan kebijakan di masa datang.

